



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,  
BUMN, DAN INVESTASI**

---

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	16 (enam belas)
Hari/Tanggal	:	Senin, 6 Februari 2017
W a k t u	:	Pukul 11.00 s.d 14.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN) didampingi oleh: 1. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Gerindra); 2. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD); 3. H. Inas Nasrullah Zubir, BE., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Hanura).
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016; 2. Rencana Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2017; 3. Harga 11 (sebelas) komoditas, terkait pengendalian harga komoditas tersebut; 4. Pasar tradisional; 5. Surat Kementerian Keuangan RI Nomor: S-76/MK.02/2017 tanggal 20 Januari 2017.
Hadir	:	a. 30 dari 49 Anggota Komisi VI DPR RI; b. Menteri Perdagangan RI beserta jajaran

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI, dibuka pukul 11.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja pada hari Senin, 6 Februari 2017 dalam rangka membahas;
  - a. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016;
  - b. Rencana Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2017;
  - c. Harga 11 (sebelas) komoditas, terkait pengendalian harga komoditas tersebut;
  - d. Pasar tradisional;
  - e. Surat Kementerian Keuangan RI Nomor: S-76/MK.02/2017 tanggal 20 Januari 2017

3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Perdagangan RI untuk menjelaskan agenda tersebut di atas.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Menteri Perdagangan RI.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Perdagangan RI Tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.525.659.502.900,00 (*Tiga Triliun Lima Ratus Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) atau 96,08% dari total Pagu Rp3.669.632.657.000,00 (*Tiga Triliun Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), termasuk *self blocking* Rp723.235.000.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan agar tetap menjaga kinerja di tahun 2017 dengan melakukan upaya optimalisasi melalui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, termasuk 10 (sepuluh) program prioritas Kementerian Perdagangan RI dalam Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan TA. 2017 sebesar Rp3.440.573.441.000,00 (*Tiga Triliun Empat Ratus Empat Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI meminta agar Menteri Perdagangan RI menetapkan kebijakan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama terhadap pengendalian harga 11 komoditas bahan kebutuhan pokok untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
4. Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian Perdagangan meningkatkan pengembangan sarana perdagangan melalui pembangunan dan revitalisasi pasar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI meningkatkan dukungan program penguatan dan pembinaan para pengusaha mikro, kecil dan menengah agar dapat menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dalam negeri melalui kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.30 WIB.